

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
ABSTRAK	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Ruang Lingkup Penulisan	7
E. Metode Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	12

G. Kerangka Konseptual	14
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II KEMUNCULAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA

A. Perkembangan Kota dan Urbanisasi	21
B. Masa Depresi Ekonomi dan Dampaknya	36
C. Masa Pendudukan Jepang dan Pasca Kemerdekaan	49

BAB III KEBIJAKAN DAN REAKSI PENGEMIS DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PENGEMIS DI KOTA SURABAYA

A. Kebijakan Pemberantasan Pengemis di Kota Surabaya 1930-1948 ..	51
1. Kebijakan Pemberantasan Pengemis Pada Masa Kolonial	52
2. Kebijakan Pemberantasan Pengemis Pada Masa Pendudukan Jepang	60
3. Kebijakan Pemberantasan Pengemis Pasca Kemerdekaan Indonesia	66
B. Reaksi Pengemis Terhadap Kebijakan Pemberantasan Pengemis di Kota Surabaya	71
1. Reaksi Para Pengemis Yang Menerima Kebijakan	71
2. Reaksi Para Pengemis Yang Menolak Kebijakan	73

BAB IV KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 84



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Kota Surabaya Tahun 1906-1930	29
Tabel 2	Penerimaan dan Belanja Hindia Belanda 1929-1934	40
Tabel 3	Jumlah pengemis yang ditangkap dan direlokasi ke tempat pemondokan di Kota Surabaya 1930-1948	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Stasiun Kota Surabaya tahun 1920	25
Gambar 2	Pengemis di Jalan Gemblongan Surabaya tahun 1915	42
Gambar 3	Pengemis di Gerbang kawasan Ampel, Surabaya sekitar tahun 1930	47
Gambar 4	Kandang Sapi yang didirikan P.P.I. agar pengemis dapat belajar berternak	53
Gambar 5	Gambar Iklan Liem Liang Hoo	59

DAFTAR ISTILAH

<i>Armenzorg</i>	: Perhimpunan untuk memelihara orang miskin.
<i>Autobus</i>	: Bus.
<i>Benedenstad</i>	: Kota bawah.
<i>Bovenstad</i>	: Kota atas.
<i>Brandweer</i>	: Pemadam kebakaran.
<i>Bouw</i>	: 1 <i>bouw</i> = 0,71 hektar.
<i>Chuo Sangi In</i>	: Dewan Pertimbangan Pusat.
<i>Decentralisatie Wet</i>	: Undang-undang yang mengatur tentang tata kota.
<i>Droogdok</i>	: Industri reparasi mesin kapal.
<i>Feodalisme</i>	: Sistem sosial yang memberi kekuasaan besar kepada golongan bangsawan.
<i>Gemeente</i>	: Kotapraja
<i>Gemeenteraad</i>	: Dewan kotapraja.
<i>Gezhaghebber van den Oosthoek</i>	: Pemerintahan Pojok Timur Jawa
<i>Grote Postweg</i>	: Jalan Raya Pos; Jalan Daendels
<i>Gulden</i>	: Mata uang Hindia Belanda.
<i>Hinterland</i>	: Wilayah pedalaman.

<i>Inheemse gemeenten</i>	: Masyarakat Bumiputra.
<i>Landrechter</i>	: Kepala Polisi Daerah.
<i>Libealisasi Ekonomi</i>	: Sistem ekonomi pasar bebas.
<i>Malaise</i>	: Kemunduran ekonomi dunia; depresi ekonomi.
<i>Plaatselijk Steuncomite</i>	: Komite Dukungan Lokal.
<i>Shi</i>	: Kota.
<i>Stadstuin</i>	: Taman kota.
<i>Staat Spoor</i>	: Perusahaan kereta api Hindia Belanda.
<i>Straat</i>	: Jalan berlapis batu.
<i>Verslag</i>	: Laporan.
<i>Viaduct</i>	: Jembatan kereta api.
<i>Vreemde Oosterlingen</i>	: Masyarakat Timur Asing; orang-orang ras Arab
<i>Weg</i>	: Jalan tanah.
<i>Werkverschaffing</i>	: Badan Penyediaan Pekerjaan.
<i>Wijk</i>	: Kampung.
<i>Wijkenstelsel</i>	: Politik segregasi terhadap orang Tionghoa dan Timur Asing.

DAFTAR SINGKATAN

Ha : Hektar.

K N I : Komite Nasional Indonesia.

O.P.P. : Oesaha Pemberantas Penganggoeran.

P B I : Persatuan Bangsa Indonesia.

P M I : Palang Merah Indonesia.

P.P.I. : Pemberantasan Penganggoeran Indonesia.

P R I : Pemoeda Repoeblik Indonesia.

S.S. : *Staat Spoor.*

